



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya kebakaran yang merupakan masalah serius dan dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
  - b. bahwa kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Kutai Barat senantiasa mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya yang sistematis, dan melibatkan peran serta masyarakat;
  - c. bahwa untuk menjalankan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara lebih efektif dan efisien maka perlu disusun suatu payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, asar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
7. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
8. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
9. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
10. *Lift* adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada bangunan gedung bertingkat.
11. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
12. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
15. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi.
16. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
18. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan

lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

21. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
22. Masyarakat Hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
23. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
24. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat ;
25. Barisan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat disebut BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

### Pasal 2

Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
  1. rumah sakit;
  2. terminal bahan bakar minyak (TBBM)/stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)/stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG);
  3. bangunan perkantoran dan usaha;
  4. bangunan perdagangan dan pertokoan;
  5. bangunan industri;
  6. gudang;
  7. hotel; dan
  8. bangunan lain yang sejenis.
- b. Bangunan Permukiman;

- c. kendaraan bermotor; dan
- d. hutan dan/atau Lahan.

BAB III  
MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Pencegahan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam Kebakaran;
  - c. sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
  - d. denah sistem manajemen Kebakaran gedung;
  - e. membentuk tim penanggulangan Kebakaran gedung;
  - f. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
  - g. melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya Kebakaran yang berasal dari sambaran petir.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan Pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya Kebakaran.

Pasal 5

Setiap Orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau Label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki Lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya Kebakaran dengan alat pemadam api ringan, Hydrant Kebakaran dan Pemercik.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan harus menyediakan Hydrant halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg, dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

#### Pasal 7

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.

#### Pasal 9

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan Hydrant dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran, harus mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detector* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan *detector* gas

yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sanksi administratif oleh Kepala PD yang membidangi urusan Kebakaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

#### Bagian Kedua Bangunan Permukiman

#### Pasal 12

- (1) Bangunan Permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang menghuni Bangunan Permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api ringan.
- (3) Camat, Lurah, Kampung, masyarakat permukiman, dan/atau pengelola perumahan membentuk BALAKAR di setiap lingkungannya.
- (4) Kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan Kebakaran memfasilitasi BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan Kebakaran serta simulasi secara rutin.
- (5) Setiap Orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (6) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi Bangunan Permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (7) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi Bangunan Permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat.

- (8) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Komplek/Kawasan permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik Hydrant halaman.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dan bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang Label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

#### Pasal 14

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan permukiman harus dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Permukiman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 13, atau Pasal 14 diberikan sanksi administratif oleh Kepala PD yang membidangi Kebakaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan permukiman tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

### Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

#### Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran; dan
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.



Bagian Keempat  
Hutan dan/atau Lahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian Kebakaran hutan dan/atau Lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya Kebakaran hutan;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya Kebakaran hutan;
  - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya Kebakaran hutan;
  - e. mengembangkan sistem informasi bahaya Kebakaran hutan yang terintegrasi;
  - f. kemitraan dengan masyarakat;
  - g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya Kebakaran hutan; dan
  - h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG).

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang membuka hutan dan Lahan dengan cara membakar.
- (2) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan maksimum 2 (dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis variatas lokal wajib memberitahukan kepada kepala kampung.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dibawah kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering.
- (4) Setiap Orang yang mengetahui adanya potensi Kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan Kebakaran hutan dan Lahan harus segera melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah terdekat.
- (5) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan Lahan yang rawan Kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini Kebakaran hutan dan Lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan antar lintas sektor.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat Kebakaran hutan dan Lahan.

### Pasal 20

- (1) Sistem peringatan dini, meliputi:
  - a. peta rawan hutan dan Lahan;
  - b. pemantauan berkala;
  - c. verifikasi lapangan;
  - d. protokol komunikasi dan pelaporan; dan
  - e. standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan kepada publik serta pemegang izin.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. surat edaran Bupati kepada PD, Pemegang izin dan masyarakat.
  - b. Instruksi Bupati kepada PD; dan
  - c. pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyiapkan langkah pencegahan paling lambat tiga (3) hari sejak peringatan dini Kebakaran hutan dan Lahan dikeluarkan.

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi setiap pemegang izin.
- (2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) di tetapkan dalam Keputusan Bupati paling lambat tiga (3) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengawasan, Evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja PD terkait.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan, evaluasi dan monitoring dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibidang lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Setiap pemegang izin bertanggung jawab terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di dalam areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin berkewajiban mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan dan segera mengambil tindakan yang perlu agar Kebakaran tidak meluas baik pada areal izinnya maupun ke areal lain disekitarnya serta segera melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Kelengkapan dan kondisi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
  - b. ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
  - c. ketersediaan menara pemantau Kebakaran Hutan dan Lahan pada areal pemilik izin;
  - d. ketersediaan personil petugas pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif; dan
  - e. ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.

- (7) Pengaturan mengenai standar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib melibatkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan audit kepatuhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Pengawasan dan monitoring dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

### Bagian Kelima

#### Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

##### Paragraf 1

#### Sarana Penyelamatan Jiwa

#### Pasal 27

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap Orang yang memiliki atau menggunakan atau mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau pekarangan dan/ atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/ atau Bahan Berbahaya; dan

- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, meliputi:
- a. akses jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat evakuasi sementara; dan
  - g. tempat evakuasi akhir.
- (5) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. tangga Kebakaran;
  - b. jalur landai atau ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan atau pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. *saf* pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem Pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2  
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 28

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
- a. akses menuju Bangunan Gedung;

- b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3  
Proteksi Bahaya Kebakaran  
Pasal 29

- (1) Proteksi pasif meliputi:
- a. bahan Bangunan Gedung;
  - b. konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. pemisahan (kompartemenisasi); dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (2) Proteksi aktif meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan Alarm Kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta Hydrant halaman;
  - d. sistem Pemercik;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. *Lift* Kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
  - j. instalasi pemadam khusus.
- (3) Untuk mengendalikan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi Kebakaran sedang atau berat.

Paragraf 4  
Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 30

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi Kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan Kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh Setiap Orang.

Paragraf 5  
Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 31

- (1) Tim penanggulangan bahaya Kebakaran gedung dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Tim penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab gedung.

Paragraf 6  
Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 32

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 7  
Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Simulasi Rutin

Pasal 33

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin meliputi penggunaan proteksi Kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan PD yang membidangi Kebakaran, paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 34

- (1) Alat pemadam api ringan harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan

singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran.

#### Pasal 35

- (1) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup Pemercik berfungsi sebagai sistem Alarm Kebakaran otomatis.

#### Pasal 36

- (1) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta Hydrant halaman terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, Hydrant halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang Kebakaran serta Hydrant halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar (*basement*) Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 37

- (1) Sistem Pemercik terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 38

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.



Pasal 39

- (1) *Lift* Kebakaran harus dipasang pada Bangunan Gedung menengah, Bangunan Gedung tinggi, dan Bangunan Gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan *Lift* penumpang dan *Lift* barang.
- (3) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 40

- (1) Pencahayaan darurat harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga Kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 41

- (1) Penunjuk arah darurat harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga Kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 42

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Bagian Keenam  
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 43

- (1) PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rekomendasi pada penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB);
  - b. Pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran;
  - c. Pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
  - d. Rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi (SLF); dan/atau
  - e. Rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

BAB IV  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 44

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*respon time*) dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 (tujuh koma lima).
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya Kebakaran dan bencana lainnya.

Bagian Kedua  
Waktu Tanggap

Pasal 45

- (1) Waktu tanggap (*respon time*) meliputi:
  - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;
  - b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan

- c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respon time*) petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan Kebakaran untuk Daerah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk Bangunan Gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal, dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau Lahan, yang terdiri atas:
    - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya Kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
    - b. waktu perjalanan dari pos pemadam Kebakaran terdekat menuju lokasi Kebakaran; dan
    - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

Bagian Ketiga  
Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran  
Pasal 46

- (1) Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:
  - a. pos pemadam Kebakaran; dan
  - b. markas komando pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan
  - b. Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah;
  - c. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
  - d. investigasi kejadian Kebakaran; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PD yang membidangi urusan Kebakaran.

Bagian Keempat  
Tata Laksana Operasional  
Pasal 47

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan Kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran Setiap Orang dapat melakukan:
  - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam Kebakaran dan pengamanan lokasi; dan

- b. menginformasikan kepada markas komando pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya Kebakaran, masyarakat dan BALAKAR, serta tim penanggulangan Kebakaran Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 48

- (1) Tindakan atau operasi pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran, meliputi:
  - a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasi (SPO) penanggulangan bahaya Kebakaran.

#### Pasal 49

- (1) Pada waktu kejadian Kebakaran, Setiap Orang yang berada di lokasi Kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*).
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang mengalami kejadian dimaksud.

#### Pasal 50

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari bahaya Kebakaran, Setiap Orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam Kebakaran untuk:
  - a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan Yang Mudah Terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan Hydrant halaman yang berada dalam Daerah Bahaya Kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.

- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi Kebakaran.

#### Pasal 51

- (1) Penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan bahaya Kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab Daerah masing-masing.

#### Pasal 52

Selain penanggulangan bahaya Kebakaran, PD yang membidangi urusan Kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan.

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Sebab Kebakaran

#### Pasal 53

- (1) PD yang membidangi urusan Kebakaran melakukan Pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

#### BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

#### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang memiliki alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan Pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada PD yang membidangi urusan Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) PD yang membidangi urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.

- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas PD yang membidangi urusan Kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala PD yang membidangi urusan Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

#### Pasal 56

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) PD yang membidangi urusan Kebakaran dalam melaksanakan Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

#### Pasal 57

Setiap Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh PD yang membidangi urusan Kebakaran diberikan Label yang menyatakan telah diperiksa.

#### Pasal 58

- (1) Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 59

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan PD yang membidangi urusan Kebakaran.
- (5) Dalam melakukan penanganan harus mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran/PD yang membidangi urusan Kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 60

- (1) Pembinaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tupoksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
  - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
  - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan Kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 61

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan tempat tinggal yang sudah dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 12 Juni 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 12 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ACHMAD SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 15/3/2020.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di Daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Potensi bencana dimaksud termasuk Kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila bahaya Kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Upaya pencegahan bahaya Kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya Kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi bahaya Kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi Kebakaran. Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya Kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. bahaya Kebakaran Ringan merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat;
- b. bahaya Kebakaran Sedang I merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- c. bahaya Kebakaran Sedang II merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan Bahan Yang Mudah Terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- d. bahaya Kebakaran Sedang III merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi Kebakaran;

- e. bahaya Kebakaran Berat I merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi Kebakaran;
- f. bahaya Kebakaran Berat II merupakan ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi Kebakaran.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan Kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban Pemeriksaan dan/atau pengujian setiap Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan lain yang sejenis yaitu Bangunan gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum merupakan Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya, contoh: rumah susun, Mall, swalayan.

#### Huruf b.

Cukup jelas.

#### Huruf c.

Cukup jelas.

#### Huruf d.

- Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata yaitu lingkungan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Hydrant halaman dapat berupa hydrant, sumur, dan bak penampungan air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman Kebakaran.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c

Pengumuman dibuat dalam bentuk stiker yang ditempel pada bagian Bangunan Gedung yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sistem informasi hutan terintegrasi dapat dilakukan antara lain melalui sistem informasi radio, sistem informasi berbasis internet, media sosial, dan sistem informasi lainnya sesuai kondisi masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah terdekat adalah Pemerintah Kampung terdekat

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56

Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 213.